

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A., (2011). *Refleksi dan Gagasan Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- AIPHSS, (2013). *AIPHSS for DHA*. Jakarta: AIPHSS: 2013
- Akhirani, (2004). Analisis Pembiayaan Kesehatan yang Bersumber Dari Pemerintah Melalui District Health Accounts di Kabupaten Sinjai. *Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Voume 07, pp.24-31.
- Azwar, A., (2010). *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Jakarta: Binarupa Aksara Publisher.
- Boydell, V., (2019). Studying social accountability in the context of health system strengthening: innovations and considerations for future work *Health Research Policy and Systems*.17:34. 10.1186/s12961-019-0438-x
- Cipta & Hendra, (2011). *Analisis Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (Performanced Based Budgeting) Pada Pemerintah Daerah*. Padang: Universitas Andalas.
- Diamond, J., (2013). *Policy Formulation and the Budget Process*. London: Palgrave Macmillan.
- Gani, A., (2010). Dimensi Supply Side (Teori Jaringan laba-laba). *Bahan Perkuliahan Pembiayaan Kesehatan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Gani, A., (2014). Anggaran Berbasis Kinerja.Fakultas Kesehatan Masyarakat. *Bahan Perkulihan Pembiayaan Kesehatan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hasnur, H., (2014). *Potret Pembiayaan Kesehatan Bersumber Pemerintah: Contoh Kasus Kabupaten Pidie Jaya*, Depok: Universitas Indonesia.
- Hipgrave, B.D., (2018). District team problem solving as an approach to district health programme planning: a review, and survey of its status in selected districts in Indonesia. *Health Policy and Planning, Oxford University Press in association with The London School of Hygiene and Tropical Medicine*. doi: 10.1093/heapol/czy007.
- IPKM, (2014). *Indek Pembangunan Kesehatan Manusia*. Jakarta: Litbang Kemenkes RI

- Julijanti, J., (2015). Proses Operasionalisasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan : Perspektif Teori Difusi Inovasi. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Volume 12 (1), pp. 67-88.
- Kemenkes, (2011). *Pedoman dan Modul Pelatihan Distric Helath Account (DHA) Untuk Tingkat Kabupaten/Kota*. Jakarta: Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan. Universitas Indonesia.
- Kemenkes, (2016). *Pedoman Dan Modul Pelatihan District Health Account (DHA) untuk Tingkat Kabupaten/Kota Disesuaikan Dengan Modul Provincial Health Account (PHA)*. 4 ed. Jakarta: Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- Khalil. M.D.Nor., Pearson, J.M & Ahmad. A., (2010). Adoption of Internet Banking:Theory of The Diffision of Innovation. *Journal of Internet Banking and Commerce*, Volume 17 (1), pp. 69-85.
- Lyytinen, K & Damsgaard, J., (2001). What's Wrong with the diffusion of innovation ? The case of a complex and networked technology. *The International Federation for Information Processing*, Vol. 59, pp. 90-173.
- Maluka, (2010). Improving district level health planning and priority setting in Tanzania through implementing accountability for reasonableness framework: Perceptions of stakeholders. *BMC Health Services Research* 2010, 10:322
- Marhaeni., Purnamasari, W. & Dewi., (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan dan Penganggaran Bersumber APBD: Suatu Kajian Literatur*. Bandung: Bagian ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Padjajaran.
- Mills, A. & Gilson, L., (1990). *Ekonomi kesehatan untuk negara-negara sedang berkembang*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Mosseveld, C.V., (2018). Health expenditure data for policy: Health accounts, national accounts or both?. *Health policy*. j.healthpol.2018.06.004.
- Murti, B., (2006). *Perencanaan anggaran untuk Investasi Kesehatan di Tingkat Kabupaten/Kota*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

- Ordika, B. D., (2012). *Difusi Inovasi Posyandu Peduli Tumbuh Kembang Aktif Tanggap Oleh PT. Nestle Indonesia-Dancow Batita bekerjasama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kota Malang Tahun 2012*. Master Thesis ed. Depok: FISIP Universitas Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 tahun 2009. *Tentang standar kompetensi pejabat struktural kesehatan*. Jakarta: Kemeterian Kesehatan RI.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2014. *Tentang Perencanaan dan Penganggaran*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012. *Tentang Sistem Kesehatan Nasional*. Jakarta: RI.
- Profil Kesehatan., (2018). *Profil Kesehatan Jawa Timur*. Surabaya: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- Rogers, E. M., (1983). *Diffusion of innovations*. 3rd ed. New York: The free Press.
- Rogers, E. M., (2003). *Diffusion of Innovation*. 5nd ed. London: Division of Macmillan Publishing Co., Inc.
- Sahin, I., (2006). Detailed Review of Rogers' Diffusion of Innovations Theory and Educational Technology-Related Studies Based on Rogers' Theory. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, Volume 5, pp. 14-23.
- Shah, A., (2006). *Budgeting and Budgetary Institution*. Washington DC: The Word Bank.
- Sistem Kesehatan Nasional, (2009). *Bentuk dan Cara Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan*. Jakarta: Depkes RI. Permendagri, 2007. *Permendagri No. 57 tahun 2007 Tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Standar Pelayanan Minimal, (2017). *SPM Kesehatan Jawa Timur*, Jakarta: Komdat Kemenkes
- Supriyanto, S. & Djohan, A. J., (2011). *Metodologi Riset Bisnis dan Kesehatan*. Banjarbaru: PT Grafika Wangi Kalimantan.

- Thabrany, H., (2005). *Pendanaan Kesehatan dan Mobilisasi Dana Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Trisnantoro, L., (2001). Perubahan Sistem Kesehatan Wilayah Akibat Kebijakan Desentralisasi. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Volume 4 No 2, pp. 93-100.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003. *Tentang Pengelolaan Keuangan*. Jakarta: RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004. *tentang sistem perencanaan pembangunan nasional*. Jakarta: RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006. *Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009. *Tentang Kesehatan*. Jakarta: RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014. *Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: RI.
- Waldo, D., (2018). National Health Accounts: A Framework For Understanding Health Care Financing. *Health Affairs* 37, No. 3 pp: 498–503.
- WHO, (2003). *Guide to introducing national health accounts with spesial applications for low-income and middle-income countries*. Geneva: WHO.
- WHO, (2008). *Guide to Producing Regional Health Accounts Within The National Health Accounts*. Geneva: WHO.
- WHO, (2010). *Planning and Implementation of Distric Health Module*, s.l.:WHO.
- Zhang., (2015). Using diffusion of innovation theory to understand the factors impacting patient acceptance and use of consumer e-health innovations: a case study in a primary care clinic. *BMC Health Services Research*. 15:71 DOI 10.1186/s12913-015-0726-2.